

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Masa sentralisasi pemerintahan telah berakhir diganti dengan otonomi daerah. Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004, setiap daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit mungkin adanya campur tangan dari pemerintah pusat. UU No. 32 tahun 2004 menjelaskan pula bahwa pemberian otonomi luas kepada pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan kata lain, tujuan dari otonomi daerah adalah untuk menciptakan kemandirian daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.

Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Kebijakan otonomi daerah merupakan pendelegasian kewenangan yang disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia (SDM) dalam kerangka desentralisasi fiskal. Dalam menghadapi desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa potensi fiskal pemerintah daerah satu dengan daerah yang lain bisa jadi sangat beragam perbedaan ini pada gilirannya dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang beragam pula. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (**Kuncoro, 2004**).

Pembangunan ekonomi ini ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk sehingga terjadi perbaikan

kesejahteraan. Kenyataan yang terjadi dalam pemerintah daerah saat ini adalah dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi ternyata tidak selalu diikuti dengan peningkatan belanja modal hal ini dapat dilihat dari kecilnya jumlah belanja modal yang dianggarkan dibandingkan dengan total anggaran belanja daerah yaitu hanya sebesar kurang dari 20 % seperti dapat dilihat pada lampiran Anggaran Belanja Daerah sedangkan anggaran belanja yang tertinggi adalah anggaran belanja pegawai yang mencapai lebih dari 50 % setiap tahunnya dari total anggaran belanja pada Provinsi Jawa Barat.

Dengan adanya otonomi daerah pula, maka dengan tegas terjadi pemisahan fungsi antara fungsi Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif). Berdasarkan perbedaan fungsi tersebut, menunjukkan bahwa antara legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan, eksekutif melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas anggaran daerah, yang merupakan manifestasi dari pelayanan kepada publik, sedangkan legislatif berperan aktif dalam melaksanakan legislasi, penganggaran, dan pengawasan (Halim, 2006).

Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim, 2001). Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal yang signifikan hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah tersebut banyak tersedot untuk membiayai belanja lainnya dimana rata-rata belanja modal hanya mendapatkan persentase sebesar 12,8 % dari total PAD seperti dapat dilihat di lampiran pada kabupaten/kota pada Provinsi Jawa Barat.

Kemampuan keuangan setiap daerah tidak sama dalam mendanai berbagai macam kegiatannya, hal tersebut menimbulkan adanya kesenjangan fiskal antar satu daerah dengan daerah lainnya. Untuk mengatasi kesenjangan fiskal ini, Pemerintah mengalokasikan dana transfer yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum(DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DanaAlokasi Umum (DAU) merupakan salah satu dana perimbangan dari pemerintah yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU 32/2004). Dengan adanya transfer dana dari Pemerintah Pusat ini diharapkan Pemerintah Daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya. Namun, pada praktiknya, transfer dana yang bersumber dari APBN merupakan sumber pendanaan utama Pemerintah Daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari.

Keputusan dalam pengalokasian belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah akan infrastruktur daerah baik untuk fasilitas masyarakat maupun untuk kelancaran akan pekerjaan pemerintahan. **Saranggih (2003)** menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya melakukan aktifitas pembangunan.

Dari latar belakang diatas serta penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2006) meneliti adanya pengaruh positif antara pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Penelitian tersebut memiliki keterbatasan dimana hanya dilakukan pada periode 2004-2005, oleh karena itu dalam penelitian ini akan dilakukan penelitian ulang dengan penggunaan rentang periode yang lebih panjang yaitu 3 tahun dengan judul penelitian sebagai berikut "PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN

ANGGARAN BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT “.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian pada latar belakang penulis merumuskan permasalahan ke dalam pernyataan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial terhadap anggaran Belanja Modal pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat TA 2008-2010.
2. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan terhadap anggaran Belanja Modal pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat TA 2008-2010.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat TA 2008-2010.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat TA 2008-2010.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi praktisi, penelitian ini maka diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah baik kabupaten maupun kota selaku pengelola keuangan daerah, dalam menentukan alokasi belanja modal di masa yang akan datang disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum yang diterima daerah. Sehingga Pemerintah Daerah dapat lebih efektif dan efisien dalam mengalokasikan belanjanya dan pelayanan publiknya pun dapat ditingkatkan.
- 2) Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperluas wawasan pengetahuan mengenai akuntansi sektor publik dalam hal ini yaitu ilmu pemerintahan mengenai pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten/Kota di Jawa Barat, khususnya mengenai masalah pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum serta pengaruhnya terhadap anggaran belanja modal.
- 3) Bagi penulis lainnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya sepanjang masih berhubungan dengan objek penelitian yang sama.

1.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis melaksanakan penelitian pada Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Jawa Barat melalui Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2008-2010 dan data PDRB per kapita yang bersumber dari BPS Jawa Barat yang berlokasi di jalan. PH. Mustofa No. 43. Sedangkan waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini adalah dari bulan Agustus 2012 sampai bulan Oktober 2012